

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh dari atas penelitian ini serta tujuan dilakukannya penelitian ini, maka kesimpulan penelitian mengenai Tata Kelola Perijinan Siup Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintahan Kota. Dalam melaksanakan Tata Kelola Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya, dari hasil tata kelola perijinan secara online dirasakan oleh petugas pengelola perijinan yang digali dari wawancara adalah sebagai berikut:

1. Mudahnya tata kelola perijinan namun masih membutuhkan perbaikan pada sistem aplikasinya dan bimbingan bagi petugas pengelola pelayanan perijinan guna untuk meningkatkan pelayanan perijinan agar lebih baik.
2. Dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni dalam pengelolaan pelayanan perijinan.
3. Aturan Hukum masih kurang terperinci perundang – undangan yang mengatur jalannya perijinan perijinan sehingga membutuhkan kebijakan dari pimpinan dalam menjalankannya. Dan *Good Governanace* sudah dijalankan dengan baik namun masih belum maksimal dan kendala yang dihadapi .Selain pelayanan Siup yang sudah Online di UPTSA juga menyediakan loket mandiri yang dimana jika masyarakat yang mengerjakan Siup dapat dikerjakan di loket mandiri dan dapat dipandu oleh *Custemer Servive* bagian Siup. Tetapi hanya memandu tidak membantu mengerjakan karena Siup dituntut untuk mandiri tidak lagi dibantu mengerjakan.

Dengan demikian proses pemberian pelayanan Siup tidak semua transparant karena masih ada kendala yang dihadapi oleh aparat birokrat. Tetapi dengan adanya kendala itu semua tidak menyurutkan tujuan dari instransi untuk tetap menjalankan pemerintahan yang baik dan tetap melayani masyarakat seperti biasanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan berbagai perubahan dan pendekatan dan penerepan berbagai inovasi serta kebijakan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik maka dituntut untuk masyarakat mengikuti perubahan itu, tetepi pemerintah juga harus melihat kebawah apakah bisa masyarakat mengikuti perubahan itu karena yang dilayani adalah masyarakat.
2. Dibutuhkannya staf yang terampil dan *responsiveness* dalam membantu loket mandiri di UPTSA dalam mengerjakan Siup agar tidak terlalu lama dalam melakukan pendampingan pembuatan Siup.
3. Perlunya sebuah inovasi sosialisasi dalam rangka keterbukaan informasi tentang sistem, aturan, mengenai prosedur dan biaya yang sifatnya kontinyu serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.